

Evaluasi Kualitas Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Di Kota Bandar Lampung

(Ujian Tengah Semester)

Oleh :

Salsabila Yulistiani Januar

2216041087



ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

ABSTRACT

Education is an important in development, because with education people will become smarter and will then form high quality Human Resources (HR). Education is an obligation that must be carrier out by every citizen regardless of social strata, rich or poor. Like education in the city of Bandar Lampung, which requires its citizens to have a minimum education of 12 years. By being highly educated, ypu can increase teh competitiveness of Bandar lampung City with other regions.

The aim of this research is to evaluate the implementation of the 12 year Compulsory Education Program. This research uses quantitative research methods ans uses Cluster Sampling in sampling. The results of this research were very effective results for the 12 year compulsory education program with 27 respondents (45%). As well as getting 36 respondents (60%) who thought this program was very effective in reducing school dropout rates.

Keyword : Evaluation, Education, 12 years of compulsory education.

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan menjadi lebih cerdas selanjutnya akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara tanpa melihat strata sosial, kaya maupun miskin. Seperti halnya pendidikan di Kota Bandar Lampung yang mewajibkan warganya minimal berpendidikan wajib belajar 12 tahun. Dengan berpendidikan tinggi maka dapat meningkatkan daya saing Kota Bandar Lampung dengan daerah lain.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan Cluster Sampling dalam pengambilan sampelnya. Hasil penelitian ini yaitu mendapatkan hasil sangat efektif untuk adanya program wajib belajar 12 tahun dengan mendapatkan 27 responden (45%). Serta mendapatkan 36 responden (60%) yang menganggap program ini sangat efektif dalam mengurangi angka putus sekolah.

Kata Kunci : Evaluasi, Pendidikan, Wajib belajar 12 tahun.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	2
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	6
BAB I	7
PENDAHULUAN.....	7
1.2 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
BAB II	14
LANDASAN TEORI	14
2.1 Kajian Pustaka.....	14
2.2 Pendidikan	16
2.2.1 Pendidikan Formal	16
2.2.2 Pendidikan Informal	17
2.2.3 Pendidikan Non formal.....	17
2.3 Evaluasi Program	18
2.3.1 Pengertian Evaluasi Program	18
2.3.2 Tujuan Evaluasi Program.....	19
2.4 Wajib Belajar 12 Tahun.....	19
2.4.1 Pengertian Wajib Belajar	19
2.4.2 Upaya meningkatkan Program Wajib Belajar 12 Tahun.....	20
2.5 Kerangka Pikir	21
2.6 Hipotesis	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	22
3.3 Uji Operasionalisasi dan Konseptual	22
3.3.1 Uji Konseptual	22
3.3.2 Uji Operasional	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Uji Data	24

3.5.1 Uji Parameter	24
3.5.2 Uji Goodness of Fit	24
3.6 Analisis Data.....	24
BAB IV.....	25
HASIL & PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum	25
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	25
4.1.2 Gambaran Umum Program Wajib Belajar	26
4.2 Hasil & Pembahasan.....	27
BAB V	30
SIMPULAN DAN SARAN	30
5.1 Simpulan.....	30
5.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah siswa SD,SMP,SMA,SMK Kota Bandar Lampung.....	10
Tabel 2.2 Angka Partisipasi Murni Kota Bandar Lampung.....	12
Tabel 3 : Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan	14
Tabel 4 : Tabel Uji Operasional	23
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022.....	26
Tabel 6 : Tabel Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 7 : Seberapa efektif program wajib belajar 12 tahun dalam meningkatkan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung.....	27
Tabel 8 : Bagaimana kualitas fasilitas dan infrastruktur sekolah di Kota Bandar Lampung	28
Tabel 9 : Apakah Anda merasa program ini telah membantu Anda meningkatkan tingkat literasi dan kompetensi siswa di kota Bandar Lampung	28
Tabel 10 : Sejauh mana program ini berhasil mengurangi angka putus sekolah di Kota ini	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang dan berjangka panjang. Faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara.

Dalam pembukaan UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai pendidikan tersebut yaitu tercantum pada UUD 1945 pasal 31, ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Pendidikan merupakan hal paling penting dan investasi masa yang akan datang dalam suatu negara. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang (Talman, dkk : 2016).

Pendidikan bermutu dan berkualitas pada saat ini sangatlah dibutuhkan bagi perkembangan setiap individu di seluruh dunia, yang mana dewasa ini kita melihat setiap negara mulai berlomba-lomba untuk merencanakan pendidikan yang sangat tinggi bagi setiap warganya. Dengan pendidikan yang baik maka sebuah bangsa didalamnya secara otomatis mulai membangun dan mendidik masyarakatnya kearah yang berkompeten dan

juga melalui pendidikan negara mencoba untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas, dengan kata lain dapat bersaing secara kompeten dengan warga negara lain. Tanpa pendidikan yang bermutu dan berkualitas maka tujuan dari negara untuk membangun manusianya akan sia-sia. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan salah satu hal yang ingin dicapai oleh setiap negara, bilamana negara tersebut ingin meraih kejayaan di masa sekarang ini.

Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban, lebih dari itu pendidikan merupakan sebuah kebutuhan akan lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Tujuan pendidikan itu beragam, tergantung pribadi tiap individu memandang pendidikan itu sendiri, ada yang memandang pendidikan yang baik dapat memperbaiki status kerjanya, sehingga mendapatkan pekerjaan nyaman, ada pula yang memandang pendidikan adalah sebuah alat transportasi untuk membawanya menuju jenjang itu semua.

Terlepas dari pandangan itu semua, sebenarnya pendidikan adalah sesuatu hal yang luhur, suatu pendidikan tak hanya sebatas dalam lembaga formal saja tetapi pendidikan juga ada di lingkungan informal, karena hakikatnya kita lahir sampai akhir hayat. Belajar adalah bagaimana kita berkembang untuk terus menjadi baik menjadi pemimpin di bumi ini. Pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik kelompok, individu, maupun masyarakat sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Notoatmodjo, 2003).

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. (Dikdasmen, 2009:59)

Dalam bidang pendidikan, pemerintah membuat kebijaksanaan, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Dewi, Sriyanto, 2019).

Pendidikan merupakan hal penting dan investasi masa yang akan datang dalam suatu negara. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik. Pemerintah mengupayakan pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan yang dapat memberi akses dan pemerataan perolehan pendidikan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga pada usia anak produktif untuk sekolah, tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya kebijakan program Wajib Belajar ini tercantum dalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No 20 Tahun 2003: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”.

Sehubungan dengan hal itu maka Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Perda Provinsi Lampung Nomor 18 tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun. Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Wajib belajar 12 (Dua Belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pasal 2 yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah bagi penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung.

Pemerintah juga memiliki target mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.¹

¹ Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat 4

Dunia pendidikan Indonesia saat ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia disektor pendidikan, terlihat dalam rapat Banggar (Badan Anggaran) anggota DPR RI Muhammad Kadafi menilai perlu adanya rekonstruksi anggaran belanja pendidikan yang sesuai dengan amanat konstitusi sebesar 20%, Muhammad Kadafi menjelaskan bahwa “ postur anggaran untuk Kemendikbud dan Kemenag belum menunjukkan peningkatan yang signifikan”. Pada APBNP 2022 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar RP 472,6 triliun. Dengan adanya data yang disampaikan oleh Banggar, kita mengetahui betapa besarnya anggaran yang dikeluarkan Negara atau pemerintah ini untuk pendidikan.

Tabel 1.1 Jumlah siswa SD,SMP,SMA,SMK Kota Bandar Lampung

JENJANG / TAHUN	SD	SMP	SMA	SMK
2021/2022	90.149 Siswa	46.037 Siswa	26.525 Siswa	23.347 Siswa
2022/2023	89.009 Siswa	45.596 Siswa	27.387 Siswa	22.850 Siswa
2023/2024	89.609 Siswa	45.635 Siswa	28.334 Siswa	22.654 Siswa

Sumber : Data Pokok Pendidikan (Bandar Lampung dalam angka 2023)

Dengan adanya data jumlah siswa keseluruhan di Kota Bandar Lampung di atas yang telah dijelaskan di atas, kita bisa melihat betapa banyaknya jumlah siswa. Yang mana di tahun ajaran 2021/2022 saja jumlahnya untuk Sekolah Dasar (SD) 90.149 ribu lebih siswa, tahun 2022/2023 sebesar 89.009 siswa, dan tahun 2023/2024 sebesar 89.609 siswa. Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2021/2022 sebesar 46.037, tahun 2022/2023 sebesar 45.596 siswa, dan tahun 2023/2024 sebesar 45.635 siswa. Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2021/2022 sebesar 26.525 siswa, tahun 2022/2023 sebesar 27.387 siswa, dan tahun 2023/2024 sebesar 28.334 siswa. Dan yang terakhir ialah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun ajaran 2021/2022 sebesar 23.347 siswa, tahun 2022/2023 sebesar 22.850 siswa, dan tahun 2023/2024 sebesar 22.654 siswa.

Keberhasilan program wajib belajar 12 tahun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam pelaksanaan program wajib belajar baik sebagai peserta didik, orang tua / wali peserta didik, maupun

badan/lembaga swasta asing dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, dan / atau orang pribadi. Tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut salah satunya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa. Disamping beasiswa, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional pendidikan untuk setiap satuan pendidikan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 tahun. Dengan adanya pemberian bantuan beasiswa dan biaya operasional tersebut diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah peserta didik utama disebabkan alasan ekonomi.

Pengertian belajar menurut Fry, Keteridge, dan Marshall (2008, p.8) *“Learning is not single thing; it may involve mastering abstract principles, understanding proofs, remembering factual information, acquiring methods, techniques and approaches, recognition, reasoning, debating ideas, or developing behaviour appropriate to specific situations; it is about change.”* Yang berarti bahwa belajar bukan satu hal, namun mungkin melibatkan penguasaan prinsip-prinsip abstrak, memahami bukti, mengingat informasi aktual, memperoleh metode, teknik dan pendekatan, pengakuan, penalaran, berdebat ide, atau mengembangkan perilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. Oleh karena itu, belajar adalah tentang perubahan sebelum dan sesudah belajar.

Wajib belajar merupakan program yang mewajibkan semua anak usia sekolah mengikuti proses belajar sesuai tingkat umurnya, sejak dikeluarkannya Inpres No 10 Tahun 1973, pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia merencanakan Program Wajib Belajar Enam Tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional, kemudian Pemerintah Indonesia melanjutkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sejak bulan Mei tahun 1994. Dan kembali Pemerintah Indonesia sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar 9 tahun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla merancang Program Indonesia Pintar. Program ini memiliki fokus utama pada implementasi Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, dengan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak usia 7-18 tahun sampai jenjang menengah atau dari SD MI sampai SMA/SMK/MA. (Talman, dkk:2016).

Menurut Sparta (Rothbard, 1999, p.19) mengatakan *“The full logical conclusion of the compulsory system; absolute state control over the “whole child”, uniformity and education in passive obedience to state orders”*. Keseluruhan kesimpulan logis dari sistem wajib belajar adalah kendali penuh negara terhadap “seluruh anak”, keseragaman

dan pendidikan diatur pada perintah negara. Oleh karena itu, keseluruhan dari sistem wajib belajar diatur khusus oleh undang-undang setiap negara yang melaksanakan wajib belajar. Sekolah-sekolah yang melaksanakan program wajib belajar harus memenuhi standar instruksi yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, menurut Sensus Penduduk (SP) 2000 jumlah penduduk Indonesia adalah 206,3 juta jiwa, pada tahun 2010 menjadi 237 juta jiwa, dan hingga 2021 ini disebutkan berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 138,3 juta jiwa laki-laki dan 135,57 juta jiwa perempuan. Dengan jumlah penduduk yang besar ini tentu tidak sebanding dengan negara ASEAN, kualitas SDM Indonesia masih jauh tertinggal. Hal ini dapat diketahui dari rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berdasarkan data BPS 2022, angka IPM Provinsi Lampung mencapai 70,45. Nilai tersebut dapat digolongkan kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Lampung semakin baik. Termasuk kota Bandar Lampung menyumbang angka IPM sebanyak 78,01.

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota Provinsi dan kota Terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332/km². Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan. Dengan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 2.2 Angka Partisipasi Murni Kota Bandar Lampung

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Murni
SD/MI/Sederajat	99
SMP/MTS/Sederajat	84
SMA/MA/Sederajat	70

Dari hal tersebut penulis bermaksud mencari tahu dengan meneliti salah satu sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung, hambatan apa yang terjadi selama program ini terlaksana, dengan mengambil judul penelitian “Evaluasi Kualitas kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Bandar Lampung?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Bandar Lampung.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Tabel 3 : Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama Pengarang	Judul & Tahun Penelitian	Hasil
1.	Yenny Merinatul Hasanah	Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta (Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, Vol 5, No 2, September 2017 Halaman 228-239)	Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun; kecukupan tenaga pendidik belum terpenuhi pada jenjang SD, Ketersediaan sarana prasarana belum terpenuhi keseluruhan, ketersediaan pembiayaan pendidikan sudah terpenuhi. Pencapaian tujuan program wajib belajar; meningkatkan APS, mengurangi APS, meningkatkan AM, hambatan-hambatan; rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, rendahnya minat anak dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, sosialisasi program wajib belajar kurang maksimal.
2.	Rusma Putri Nurjati	Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2018, (Skripsi Jurusan Geografi, FIS	Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal selama 3 periode (tahun 2016-2018) mengalami kenaikan. Tingkat APK mengalami kenaikan sebesar 1,58% dan tingkat APM sebesar 1,33%. Hambatan pelaksanaan program wajib

		Unnes)	belajar 12 tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal; tingkat pendapatan orang tua tergolong rendah yaitu kurang dari RP1.500.000, tingkat pendidikan terakhir orang tua rata-rata di tingkat SD, jenis pekerjaan orangtua rata-rata sebagai nelayan.
3.	Nur Evi Fadillah	Pelaksanaan Program wajib Belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo Tahun 2019 (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)	Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo belum berjalan dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor pendukung pelaksanaan program; lokasi SMPN 2 Satu Atap yang strategis, kerja sama dengan lembaga pendidikan, dan kesadaran masyarakat akan pendidikan. Faktor penghambat pelaksanaan program; faktor lingkungan, rendahnya minat belajar, kurangnya motivasi dan faktor ekonomi.

Dari tiga hasil kajian dari penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Ketiga penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian terdahulu tujuannya untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program yaitu dikarenakan keluarga kurang mampu, sedangkan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai pengevaluasian terhadap program yang sudah dijalankan.

2.2 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa, Sumber Daya Manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Pasal 1 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2012:12).

Pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban, lebih dari itu pendidikan merupakan sebuah kebutuhan akan lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Tujuan pendidikan itu beragam, tergantung pribadi tiap individu memandang pendidikan itu sendiri, ada yang memandang pendidikan yang baik dapat memperbaiki status kerjanya, sehingga mendapatkan pekerjaan nyaman, ada pula yang memandang pendidikan adalah sebuah alat transportasi untuk membawanya menuju jenjang itu semua.

Terlepas dari pandangan itu semua, sebenarnya pendidikan adalah sesuatu hal yang luhur, suatu pendidikan tak hanya sebatas dalam lembaga formal saja tetapi pendidikan juga ada dilingkungan informal, karena hakikatnya kita lahir sampai akhir hayat. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan Formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

2.2.1 Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Pendidikan formal merupakan lembaga sekolah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muda bangsa dan warga negara Indonesia. Kemudian, pendidikan formal secara umum adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Dengan adanya pendidikan formal, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian yang baik, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

2.2.2 Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga yang berlangsung sejak anak dilahirkan. Dalam keluarga yang memahami arti penting pendidikan keluarga, maka ia akan secara sadar mendidik anak-anaknya agar terbentuk kepribadian yang baik. Sedangkan dalam keluarga yang kurang mengerti arti penting pendidikan keluarga, maka perilakunya sehari-hari secara tidak sadar adalah pendidikan.

Pendidikan informal sama sekali tidak terorganisasi secara struktural, tidak terdapat penjenjangan kronologis, tidak mengenal adanya ijazah, waktu belajar sepanjang hayat, dan lebih merupakan hasil pengalaman individual mandiri dan pendidikannya tidak terjadi di dalam medan interaksi belajar mengajar buatan. Menurut DR. Philip H Coombs, pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai meninggal. Contoh; agama, budi pekerti, etika, sopan santun, norma, dan sejenisnya.

2.2.3 Pendidikan Non formal

Pengertian mengenai pendidikan non formal mempunyai cakupan yang luas, dapat merupakan kegiatan atau lembaga atau lembaga yang melengkapi pendidikan non formal, dapat pula berdiri sendiri. Philip H. Coombs berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar system formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Jalur pendidikan ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Sumardiono, 2007: 55-56). Pendidikan non formal merupakan proses kegiatan di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara teratur dan bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana (Antony, 2004: 225).

2.3 Evaluasi Program

2.3.1 Pengertian Evaluasi Program

Kata evaluasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penilaian. Evaluasi juga berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata *evaluation*, yang mempunyai definisi yaitu yang dituliskan dalam kamus *Oxford Advanced Learners's Dictionary of Current English*, evaluasi adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Evaluasi dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai sesuatu. Untuk menentukan nilai dari sesuatu baik benda atau bukan benda dibutuhkan pengukuran dengan menggunakan alat ukur atau instrumen yang sudah ditentukan kebenarannya.

Menurut pengertian secara umum, program merupakan sebuah rencana. Rencana ini mungkin berupa keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, mencari pekerjaan, membantu orang tua dalam membina usaha, atau mungkin juga belum menentukan program apapun. Program dapat didefinisikan sebagai unit kegiatan yang merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Definisi lain tentang evaluasi adalah suatu kegiatan yang menentukan keberadaan nilai seperti baik buruk, efektif tidak efektif terhadap obyek yang dievaluasi sesuai dengan tolak ukur tertentu, berdasarkan informasi atau data yang dikumpulkan dengan menggunakan cara-cara secara ilmiah dianggap sah. Adapun pengertian evaluasi program menurut Cronbach dan Stufflebeam dalam buku Arikunto adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Widoyoko mengartikan bahwa evaluasi program pembelajaran sebagai proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi dan menyajikan informasi tentang implementasi rancangan program pembelajaran yang telah disusun

oleh guru untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program pembelajaran selanjutnya.

2.3.2 Tujuan Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program berkaitan dengan tujuan organisasi atau lembaga unit lembaga. Secara spesifik tujuan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program yang selanjutnya informasi-informasi tersebut dipergunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil keputusan. Terdapat dua macam tujuan evaluasi program, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada tiap-tiap komponen program.

Tujuan dari evaluasi ialah untuk menilai ketercapaian program dan menyediakan informasi kepada lembaga yang memiliki program untuk dianalisa kembali agar dapat mengambil sebuah keputusan yang baik. Sebuah program yang dievaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas suatu lembaga terhadap masyarakat dan para pelaksana program. Hasil evaluasi menjadi sebuah informasi yang penting untuk mengetahui informasi-informasi terkait seberapa efektif program telah berjalan sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kepedulian pelaksanaan program terhadap program yang dijalankan.

2.4 Wajib Belajar 12 Tahun

2.4.1 Pengertian Wajib Belajar

Pengertian wajib belajar dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 47 tentang wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Program wajib belajar merupakan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perluasan akses pendidikan yang berkembang searah dengan kebutuhan bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu contohnya yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan program wajib belajar. Pada dasarnya program Wajib Belajar 9 tahun berlangsung selama Sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (SD) enam

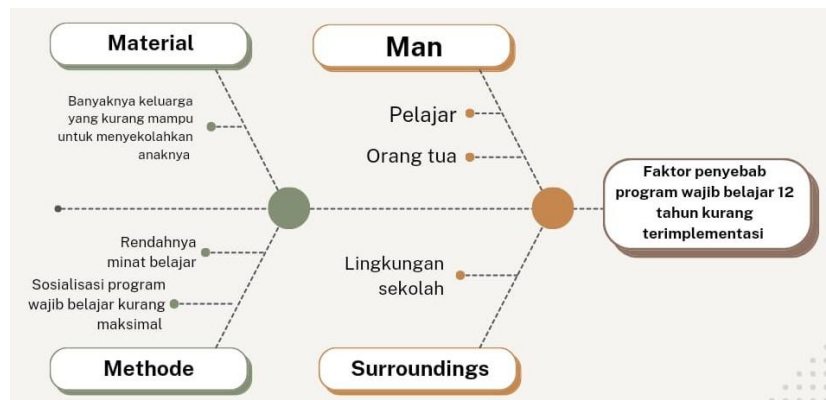
tahun ditambah Sekolah Menengah Pertama tiga tahun. Wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi untuk meningkatkan sumber daya manusia, sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, wajib belajar 9 tahun bukan sekedar angka partisipasi, tetapi pendidikan dasar yang punya kualitas tertentu.

Program Wajib Belajar 12 Tahun merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu Program Wajib Belajar 9 tahun. Dimana Program Wajib Belajar 12 tahun ini kemudian dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU), dengan payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 80 Tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU).

2.4.2 Upaya meningkatkan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar diantaranya; penambahan jumlah bangunan atau kelas lembaga pendidikan, penambahan jumlah tenaga kependidikan, perkembangan ilmu dan teknologi, penambahan dan penggantian sejumlah sarana atau prasarana pendidikan, melaksanakan berbagai penataran baik pada guru maupun tenaga pendidikan lainnya, dan melakukan program wajib belajar 9 tahun.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Hipotesis

H_{a1} : Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bandar Lampung tidak efektif dalam mengurangi angka putus sekolah.

H_{o1} : Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bandar Lampung efektif dalam mengurangi angka putus sekolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2016). Penelitian ini akan menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain yaitu untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu program wajib belajar 12 tahun (X) dan variabel dependen kualitas kebijakan (Y).

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Handayani (2020), Populasi merupakan totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelajar tingkat 3 di SMA Kota Bandar Lampung. Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Cluster Sampling.

3.3 Uji Operasionalisasi dan Konseptual

3.3.1 Uji Konseptual

- **Program Wajib Belajar 12 Tahun**

Wajib belajar adalah kewajiban anak usia tujuh strip 12 tahun untuk memperoleh pendidikan dasar (dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa) (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2007). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berbunyi “Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Dalam Perda Provinsi Lampung No 18 tahun 2014 termuat dalam pasal 1 ayat (7) berbunyi “Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Berdasarkan penjelasan wajib belajar menurut Undang-undang di atas maka penulis menyimpulkan bahwa wajib belajar merupakan sebuah program Pemerintah yang

mewajibkan warga Negara Indonesia untuk melaksanakannya dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

- **Kualitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam blog yang ditulis oleh Rosianasfar (2013), kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu.

Berkualitas diartikan bahwa sesuatu mempunyai kualitas atau mutu yang baik.

Deming (1982) mengatakan bahwa “Kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang”. Hal ini berarti bahwa kualitas harus didasarkan pada kepuasan pelanggan itu sendiri.

3.3.2 Uji Operasional

Tabel 4 : Tabel Uji Operasional

NO	VARIABEL	KONSEP VARIABEL	INDIKATOR
	Variabel independen		
1	Program Wajib Belajar 12 Tahun	Wajib belajar adalah program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar penduduk dapat menjalani program pendidikan minimal setara Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK)	1). Keberhasilan program wajib belajar 2). Minat penduduk untuk menjalani program ini.
	Variabel dependen		
2	Kualitas	Kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Fungsi kualitas adalah memberikan kepuasan kepada konsumen.	1). Kinerja 2). Kesesuaian 3). Kehandalan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2017). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuesioner tertutup, karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia (Sugiyono,2017).

3.5 Uji Data

3.5.1 Uji Parameter

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel endogen dalam persamaan reduced form. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-kritis}$, maka H_0 ditolak.

3.5.2 Uji Goodness of Fit

Untuk melihat sejauh mana model yang dirumuskan dapat menerapkan variasi perubahan variabel endogen dilakukan dengan cara uji kecocokan model. Jika R^2 (nilai koefisien determinasi) tinggi maka variabel independen dapat menerangkan variasi perubahan variabel dependen.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini mengevaluasi kualitas program wajib belajar 12 tahun dengan menggunakan Error Correction Model. Error correction model adalah suatu bentuk model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek variabel bebas terhadap variabel terikat (Shoerul, 2011). Berikut adalah bentuk umum dari persamaan ECM jangka panjang:

$$Y = C + Y_1X_1 + \dots + Y_nX_n$$

Dimana : Y = Kualitas

X_1 = Program wajib belajar

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

a. Letak Geografis

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 km²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 km² dan secara administrasi dibatasi oleh :

- Sebelah Utara : Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
- Sebelah Selatan : kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung serta Teluk Lampung
- Sebelah Barat : Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
- Sebelah Timur : Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung berada pada ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut, kecuali sebagian wilayah kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kemiling berada pada ketinggian antara 500-700 meter dari permukaan laut.

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA. Dari segi jarak kedudukan Kota Bandar Lampung terhadap kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan ekonomi Jabodetabek dan Jawa Barat menjadikannya salah satu pilihan bagi relokasi dan tempat limpahan kegiatan ekonomi dari wilayah tersebut. Dalam kaitan ini, Kota Bandar Lampung menjadi bagian dari poros

pertumbuhan Pantai Utara Jawa dan bagian dari proses perkembangan Pulau Jawa bagian Barat.

b. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun terus meningkat. Selama tahun 2022 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk Kota Bandar Lampung dari tahun 2020-2022 :

Tabel 5 : Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	1.166.066
2021	1.184.949
2022	1.209.937

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung

4.1.2 Gambaran Umum Program Wajib Belajar

Program Wajib Belajar 12 Tahun ini merupakan program keberlanjutan dari program sebelumnya yaitu Program Wajib Belajar 9 Tahun. Dimana Program Wajib Belajar 12 Tahun ini kemudian dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU), dengan payung hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No 80 Tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU). Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Program PMU ini merupakan strategi untuk menghadapi meningkatnya pendudukan usia produktif di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari program PMU ini yaitu mempercepat kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah saat ini yang baru mencapai 78,7% menjadi sekitar 97% pada tahun 2020.

Adapun tujuan dari program PMU ini yaitu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial politik serta kesejahteraan masyarakat.

4.2 Hasil & Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Cluster Sampling yaitu mengambil beberapa kelompok secara acak dari populasi. Responden pada penelitian ini adalah para siswa tingkat 3 MAN 2 Bandar Lampung. Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin. Berikut penjelasan kriteria responden dalam penelitian ini:

Kriteria responden berdasarkan jenis kelamin berguna untuk mengetahui tingkat porporasi responden yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Penyajian kriteria responden berdasarkan jenis kelamin dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Tabel Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	30	50%
Perempuan	30	50%
Total	60	100%

Sumber : Diolah Peneliti, tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 60 responden dengan kriteria laki-laki berjumlah 30 orang atau 50% (dari total responden) dan perempuan berjumlah 30 orang atau 50% (dari total responden). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kriteria responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama.

Berikut hasil yang akan penulis uraikan mengenai Evaluasi Kualitas Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Bandar Lampung, melalui penelitian lapangan dengan menggunakan kuisioner dan pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan. Uraian analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 7 : Seberapa efektif program wajib belajar 12 tahun dalam meningkatkan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung

Alternatif Pertanyaan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Efektif	27	45%
Cukup Efektif	27	45%
Kurang Efektif	3	5%
Tidak Efektif	3	5%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel 4.3, hasil penelitian kuesioner yang dibuat oleh penulis pada tabel 4.3, maka dapat dilihat bahwa alternatif jawaban sangat efektif, cukup efektif, kurang efektif, tidak efektif bisa dilihat sebagai berikut; sangat efektif terdapat 27 responden (45%), cukup efektif terdapat 27 responden (45%), kurang efektif terdapat 3 responden (5%), serta tidak efektif terdapat 3 responden juga (5%).

Dapat disimpulkan bahwa seberapa efektif program wajib belajar 12 tahun dalam meningkatkan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung yaitu sangat efektif sebanyak 27 responden (45%).

Tabel 8 : Bagaimana kualitas fasilitas dan infrastruktur sekolah di Kota Bandar Lampung

Alternatif Pertanyaan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Baik	33	55%
Baik	15	25%
Cukup	6	10%
Kurang	6	10%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel 4.4, hasil penelitian kuesioner yang dibuat oleh penulis pada tabel 4.4, maka dapat dilihat bahwa alternatif jawaban sangat baik, baik, cukup, dan kurang sebagai berikut; sangat baik terdapat 33 responden (55%), baik terdapat 15 responden (25%), cukup terdapat 6 responden (10%), serta kurang terdapat 6 responden (10%).

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas fasilitas dan infrastruktur sekolah di Kota Bandar Lampung yaitu sangat baik sebanyak 33 responden (55%).

Tabel 9 : Apakah Anda merasa program ini telah membantu Anda meningkatkan tingkat literasi dan kompetensi siswa di kota Bandar Lampung

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Membantu	27	45%
Membantu	24	40%

Kurang Membantu	6	10%
Tidak Membantu	3	5%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel 4.5, hasil penelitian kuesioner yang dibuat oleh penulis pada tabel 4.5, maka dapat dilihat bahwa alternatif jawaban sangat membantu, membantu, kurang membantu, tidak membantu, sebagai berikut; terdapat 27 responden (45%) yang menyatakan sangat membantu, terdapat 24 responden (40%) yang menyatakan membantu, terdapat 6 responden (10%) yang menyatakan kurang membantu, dan terdapat 3 responden (5%) yang menyatakan tidak membantu.

Maka dapat disimpulkan bahwa apakah Anda merasa Program ini telah membantu anda meningkatkan tingkat literasi dan kompetensi siswa di Kota Bandar Lampung yaitu sangat membantu sebanyak 27 responden (45%).

Tabel 10 : Sejauh mana program ini berhasil mengurangi angka putus sekolah di Kota ini

Alternatif Pertanyaan	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Sukses	36	60%
Sukses	12	20%
Kurang Sukses	9	15%
Tidak Sukses	3	5%
Total	60	100%

Berdasarkan tabel 4.6, maka hasil penelitian kuesioner yang telah dibuat oleh penulis pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa alternatif jawaban sangat sukses, sukses, kurang sukses, tidak sukses sebagai berikut; terdapat 36 responden (60%) yang menjawab sangat sukses, terdapat 12 responden (12%) yang menjawab sukses, terdapat 9 responden (15%) yang menjawab kurang sukses, serta terdapat 3 responden (5%) yang menjawab tidak sukses.

Maka dapat disimpulkan bahwa sejauh mana program ini berhasil mengurangi angka putus sekolah di Kota Ini adalah sangat sukses dengan 36 responden (60%).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada bab penutup ini, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis tentang kualitas program wajib belajar 12 tahun di Kota Bandar Lampung, penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 tahun. Kesimpulan ini dapat dijabarkan sebagai berikut;

1. Keefektifan program wajib belajar 12 tahun dalam meningkatkan akses pendidikan di Kota Bandar Lampung.
 2. Sejauh mana program ini berhasil mengurangi angka putus sekolah di Kota ini.
-
- Program wajib belajar 12 tahun ini dinilai sangat efektif dengan mendapat suara terbanyak yaitu 27 responden (45%), namun masih terdapat yang menganggap program wajib belajar ini tidak efektif yaitu sebanyak 3 responden (5%).
 - Dalam hal mengurangi angka putus sekolah menurut para responden terdapat 36 responden (60%) yang memilih sangat sukses, namun terdapat 3 responden (5%) yang memilih program ini tidak sukses dalam mengurangi angka putus sekolah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam BAB IV, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu ;

1. Diharapkan pemerintah mengembangkan program untuk mengurangi angka putus sekolah, seperti program bimbingan dan dorongan bagi siswa yang berisiko dropout.
2. Disarankan fokus pada pengembangan kompetensi guru dan peningkatan kualitas pengajaran dengan memastikan guru memiliki akses ke pelatihan berkualitas.
3. Disarankan selalu melakukan evaluasi berkala terhadap program ini untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pendidikan tercapai.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas program wajib belajar 12 di Kota Bandar Lampung dan memastikan bahwa pendidikan menjadi alat yang efektif untuk peningkatan masa depan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 1998. *Penilaian program pendidikan*. Yogyakarta : PT. Bina Aksara.
- Bashori & Aprima, Septi Gia. 2019. *Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi Lampung*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 1(1).
- Chairunnisa Coonie & Pudjosumedi. 2013. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : UHAMKA Press.
- Darusman Yus. 2021. *Model Pewarisan Budaya Melalui pendidikan Informal (Pendidikan Tradisional) Pada Masyarakat Pengrajin Kayu*. Madiun : CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Diknas. 2003. *Departemen Pendidikan Nasional Tentang Undang-Undnag Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Djibu Rusdin, 2021. *Evaluasi Pendidikan Nonformal*. Madiun : CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Elfananda Istiqlalia, 2017. *Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Blitar (Studi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di Dinas Pendidikan . skripsi Jurusan Administrasi publik Universitas Brawijaya*.
- Fadillah, Nur Evi. 2019. *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Sidoharjo, Jambon, Ponorogo*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Fry, H, Keteridge, S & Marshall. S. 2009. *A Hanbook for Teaching and Learning in Higher Education Enhancing Academic Practice*. New York, Roudledge.
- Hasanah, Yenny Merinatul. 2017. *Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidika. 5(2). UNY Yogyakarta.
- Husama, Arina & Rohmad. 2019. *Pengantar Pendidikan*. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

- Ikhyia Ulumudin & Sri Fajar. 2017. *Kajian Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. 16 (2).
- Nurhakim Rusman T. 2019. *Riset Evaluasi Dalam Pendidikan*. Ciputat.
- Nurjati, Rusma Putri. 2020. *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2018*. Skripsi Jurusan Geografi FIS Unnes.
- Pratama, D. I. 2017. *Analisis Kebijakan Wajib Belajar Terhadap Pengangguran di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Putri, Ardiliya D. 2019. *Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Dinas Pendidikan Kota Bekasi*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman Abd. 2022. *Tri Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf*. Jakarta : CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Rothbard, M. A. N. 1999. *Education Free and Compulsory*. Auburn : Ludwig Von Mises Institute.
- Sriyanto & Dewi. 2019. *Implementasi Pembelajaran Media Flip Chart and Power Point Materi Dinamika Planet Bumi Sebagai Ruang Kehidupan Kelas X IPS 1 dan X IPS 2 MA AL- ANSOR Semarang*.
- Talman Priyadi & Chaeruddin. 2016. *Wajib Belajar 12 Tahun: Tantangan Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : New Indonesia.
- Widoyoko Eko. *Evaluasi Program Pembelajaran*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.